

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : VIKA LESTARI
NPM : 1505170141
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **VIKA LESTARI**
NPM : **1505170141**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)**

Dinyatakan : **(C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. H. SUCIPTO, Ak, MM)

Penguji II

(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **VIKA LESTARI**

NPM : **1505170141**

Program Studi : **AKUNTANSI**

Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2013-2017)**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.



H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

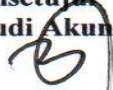
Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

Nama Mahasiswa : VIKA LESTARI
NPM : 1505170141
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
7/6/19	Perbaiki kembali bab 1, 2, 3 yg di koreksi cek data yg dianalisis Bab 14 diperbaiki	SP	
30/8/19	Jelaskan hasil analisis dan kesimpulan terori bab 2 dan hasil penelitian terdahulu yg jd referensi Jelaskan kesimpulan penyaji dan tingkat keabsahan hipotesis awal. Kesimpulan diperbaiki	SP	
12/9/19	Pembahasan diperbaiki + Referensi dari penelitian terdahulu. kesimpulan dan saran cek penulisan	SP	

Dosen Pembimbing

 27/9/19
 SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : VIKA LESTARI
NPM : 1505170141
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
26/9/19	Cek kembali yg dicorek Cek Daftar Pustaka & penulisan.	<i>[Signature]</i>	
27/9/19	Acc Sidang <i>[Signature]</i>		

Medan, September 2019

Dosen Pembimbing

[Signature] 27/9/19

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Vika Lestari. NPM. 1505170141. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), 2019. Skripsi.

Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 64 perusahaan, sementara sampel yang diambil berjumlah 22 perusahaan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit secara bersama-sama tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil uji tersebut $0,172 > 0,05$. Dewan Komisaris Independen juga tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil uji tersebut $0,872 > 0,05$. Komite Audit ada pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil uji tersebut $0,016 > 0,05$.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR



ASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017*” tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Terutama kepada ayahanda Adi Sumarwan dan ibunda tercinta Sarbini dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang, dukungan, doa serta dorongan moral maupun materil kepada penulis. Dalam kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utsra.
2. Bapak H. Januri., SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih., SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih kepada Ibu Syafrida Hani., SE.,M.Si selaku pembimbing Skripsi yang sudah memberikan arahan serta dukungannya.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Teman-teman Rival Andiga Juanda, Imas Dwi Utami, Annisa Ditiningtyas, Vivin Agustin, Dinda Pramitha, Silvia R Kandau, Fraya Fadiba, Diah Novitasari, Fahmawita Sari, Wina Nova Zeana serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis secara pribadi ataupun bagi mereka yang telah bersedia membaca skripsi ini.

Medan, September 2019
Penulis

Vika Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Magang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Uraian Teori	12
1. <i>Good Corporate Governance</i>	12
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	12
b. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	13
c. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	15
d. Peraturan <i>Good Corporate Governance</i>	16
e. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	17
2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	19
a. Pengertian Penghindaran Pajak.....	19
b. Cara Penghindaran Pajak	21
3. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Konseptual	23
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	23
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	24
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	25
4. Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	25
C. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Defenisi Operasional Variabel	28
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian	31
E. Jenis Dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil penelitian	42
1. Deskripsi Objek	42
2. Deskripsi Data	43
3. Analisis Data	49
a. Analisis Statistik Deskriptif	49
b. Uji Asumsi Klasik	51
1. Uji Normalitas Data	51
2. Uji Multikoleniaritas	54
3. Uji Heteroskedastisitas	56
4. Uji Autokorelasi	57
c. Uji Hipotesis	58
1. Uji Simultan (Uji F)	58
2. Uji Parsial (Uji t)	59
3. Uji Koefisien Determinasi	61
d. Regresi Linier Berganda	62
B. Pembahasan	64
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avooidance</i>	64
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avooidance</i>	66
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avooidance</i>	68
4. Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avooidance</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.2	Data Perhitungan Perusahaan.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel III.2	Rincian Waktu Penelitian.....	31
Tabel III.3	Populasi Penelitian.....	32
Tabel III.4	Kriteria Sampel.....	34
Tabel III.5	Sampel penelitian.....	34
Tabel III.6	Autikorelasi <i>Durbin Watson</i>	39
Tabel IV.1	Sampel Penelitian.....	43
Tabel IV.2	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Cash ETR.....	45
Tabel IV.3	Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel IV.4	Uji Normalitas kolmogorov-smirnov.....	51
Tabel IV.5	Uji Normalitas kolmogorov-smirnov setelah outlier.....	53
Tabel IV.6	Grafik Normal P-plot.....	54
Tabel IV.7	Uji Multikoleniaritas.....	55
Tabel IV.8	Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel IV.9	Uji Autokorelasi.....	57
Tabel IV.10	Uji Simultan (Uji F).....	59
Tabel IV.11	Uji Parsial (Uji t).....	60
Tabel IV.12	Uji Koefisien Determinasi.....	61
Tabel IV.13	Uji Regresi Linier Berganda.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	26
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak Rudiman dan Setiono dalam (Agusti, 2014)

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya (Agusti, 2014). Tidak maksimalnya pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan dikarenakan penerimaan pajak semakin berkurang tidak sesuai dengan target realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan celah-celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan Cadbury, 2008 dalam (Ardila & Fadhila, 2017). *Corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governancce* yang dilakukan oleh perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar.

KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) yang di bentuk oleh Pemerintah Indonesia mengeluarkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* pada tahun 2006. Menurut Irmawati dalam (Juwika & Hani, 2015) Asas *good corporate governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksiserta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda mengenai ukuran dewan komisaris seperti yang dilakukan Husni dalam (Fadhilah, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Tax Avoidance, lain halnya (Sari, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Fadhilah, 2014).

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepadadireksi UU No.40 Tahun 2007. Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen Wulandari dalam (Fadhilah, 2014).

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga

berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Berikut data Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Tabel I.2
Data Perhitungan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			TAX AVOIDANCE		
		KI	DKI	KA	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak
BUDI	2013	48	33,33	3	38.549.000	4.337.000	42.886.000
	2014	48	33,33	3	43.488.000	14.989.000	28.499.000
	2015	50,07	33,33	3	52.125.000	31.503.000	21.072.000
	2016	53,40	33,33	3	52.832.000	14.208.000	38.624.000
	2017	53,40	33,33	3	61.016.000	15.325.000	45.691.000
INTP	2013	64,03	42,86	3	6.595.154.000	1.582.860.000	5.012.294.000
	2014	64,03	42,86	3	6.814.636.000	1.521.220.000	5.293.416.000
	2015	64,03	42,86	3	5.644.576.000	1.287.915.000	4.356.661.000
	2016	51,00	42,86	3	4.145.632.000	275.313.000	3.870.319.000
	2017	51,00	42,86	3	2.287.274.000	427.456.000	1.859.818.000
LMSH	2013	74,41	33,33	3	19.437.691.207	5.054.792.013	14.382.899.194
	2014	74,82	33,33	3	11.006.796.283	3.603.680.847	7.403.115.436
	2015	74,41	33,33	3	3.807.172.880	1.862.729.485	1.944.443.395
	2016	76,31	33,33	3	9.424.028.642	3.171.213.831	6.252.814.811
	2017	79,35	33,33	3	17.488.236.349	4.521.122.499	12.967.113.850
SMGR	2013	51,01	33,33	4	6.920.399.734	1.566.101.213	5.354.298.521
	2014	51,01	42,86	4	7.090.765.967	1.517.188.688	5.573.577.279
	2015	51,01	28,57	4	5.850.923.497	1.325.482.459	4.525.441.038
	2016	51,01	28,57	4	5.084.621.543	549.584.720	4.535.036.823
	2017	51,01	28,57	4	2.746.546.363	703.520.449	2.043.025.914

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			TAX AVOIDANCE		
		KI	DKI	KA	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak
TOTO	2013	96,21	25	3	323.204.864.975	86.647.351.813	236.557.513.162
	2014	96,21	40	3	381.882.728.642	88.078.819.693	293.803.908.949
	2015	92,36	40	3	381.573.896.617	96.337.115.985	285.236.780.659
	2016	92,36	40	3	251.320.891.921	82.756.308.203	168.564.583.718
	2017	92,36	40	3	377.660.867.510	98.725.062.966	278.935.804.544
WSBP	2013	269,93	33,33	4	611.200.634.867	243.230.405.572	367.970.229.295
	2014	267,28	33,33	4	765.959.248.175	254.389.167.647	511.570.080.528
	2015	191,56	33,33	4	1.398.004.123.804	381.082.141.290	1.047.590.672.774
	2016	191,55	33,33	4	2.155.589.073.419	342.520.456.635	1.813.068.616.784
	2017	191,54	33,33	4	4.620.646.154.705	419.073.663.951	4.201.572.490.754
WTON	2013	65,15	33,33	5	1.016.690.189	392.318.510	624.371.679
	2014	65,05	33,33	6	1.139.189.462	395.420.359	743.769.103
	2015	65,05	28,57	5	1.098.081.759	395.076.705	703.005.054
	2016	65,05	33,33	5	1.295.239.236	84.209.926	1.211.029.310
	2017	65,05	33,33	5	1.462.391.358	106.275.869	1.356.115.489
NIKL	2013	65	20	4	866.970.000.000	257.101.000.000	609.869.000.000
	2014	65	33,33	4	1.023.102.000.000	345.734.000.000	677.368.000.000
	2015	65	33,33	5	168.163.000.000	66.602.000.000	101.561.000.000
	2016	65	33,33	4	414.970.000.000	131.921.000.000	283.049.000.000
	2017	65	20	4	716.211.000.000	207.297.000.000	508.914.000.000
AMFG	2013	84,73	33,33	4	450.753.000	112.395.000	338.358.000
	2014	84,73	33,33	4	597.807.000	139.172.000	458.635.000
	2015	84,82	33,33	4	464.263.000	122.917.000	341.346.000
	2016	84,82	33,33	3	348.561.000	88.117.000	260.444.000
	2017	84,83	33,33	3	63.589.000	25.020.000	38.569.000
ARNA	2013	50,47	66,67	4	316.349.602.459	78.651.688.576	237.697.913.883
	2014	54,83	66,67	4	348.379.437.541	86.728.384.322	237.697.913.883
	2015	48,09	33,33	4	95.514.316.424	24.304.373.076	71.209.943.348
	2016	51,29	33,33	4	123.838.299.924	32.462.388.949	91.375.910.975
	2017	51,3	66,67	4	166.203.941.034	44.020.031.391	122.183.909.643
INAI	2013	76,58	50	3	11.361.992.726	6.342.451.995	5.019.540.731
	2014	77,99	50	3	32.752.754.293	10.694.053.533	22.058.700.759
	2015	77,99	50	3	57.114.061.880	28.498.388.713	28.615.673.167
	2016	77,99	50	3	58.097.472.991	22.544.497.747	35.552.975.244
	2017	77,99	50	3	52.292.073.203	13.640.368.683	38.651.704.520

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			TAX AVOIDANCE		
		KI	DKI	KA	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak
LION	2013	57,70	33,33	3	85.027.065.076	20.265.714.260	64.761.350.816
	2014	57,70	33,33	3	62.857.739.316	13.856.109.214	49.001.630.102
	2015	57,70	33,33	3	58.451.801.513	12.433.164.026	46.018.637.487
	2016	57,70	33,33	3	54.671.394.698	12.325.977.643	42.345.417.055
	2017	57,70	33,33	3	20.175.438.794	10.892.495.785	9.282.943.009
DPNS	2013	66,42	33,33	3	87.322.830.461	20.509.600.140	66.813.230.321
	2014	59,64	33,33	3	17.183.018.745	2.663.152.461	14.519.866.284
	2015	59,87	33,33	3	11.832.026.060	1.972.849.888	9.859.176.172
	2016	59,87	33,33	3	12.288.056.506	2.278.665.403	10.009.391.103
	2017	59,87	33,33	3	7.568.252.565	1.604.832.494	5.963.420.071
EKAD	2013	75,45	50	3	51.988.302.824	12.537.650.003	39.450.652.821
	2014	75,45	50	3	58.721.777.723	17.955.699.441	40.756.078.282
	2015	75,45	50	3	66.306.918.116	19.266.661.660	47.040.256.456
	2016	75,45	50	3	118.449.029.979	27.763.208.449	90.685.821.530
	2017	75,45	50	3	102.649.309.681	26.453.643.952	76.195.665.729
INCI	2013	46,41	33,33	3	10.690.815.380	359.007.284	10.331.808.096
	2014	46,36	33,33	3	11.358.760.719	330.539.707	11.028.221.012
	2015	46,41	33,33	3	19.220.641.866	2.259.981.843	16.960.660.023
	2016	48,87	33,33	3	13.294.748.095	3.305.911.836	9.988.836.259
	2017	48,87	33,33	3	22.077.467.345	5.523.195.214	16.554.272.131
SRSN	2013	77,98	37,5	3	32.666.954	16.672.659	15.994.295
	2014	77,98	37,5	3	29.857.990	15.401.730	14.456.260
	2015	77,98	37,5	3	20.714.663	5.209.875	15.504.788
	2016	68	37,5	3	1.688.362	9.367.689	11.056.051
	2017	55,54	37,5	3	18.969.208	1.270.641	17.698.567
AKPI	2013	58,64	33,33	4	66.416.762	31.796.426	34.620.336
	2014	58,64	33,33	4	61.206.366	26.515.662	34.690.704
	2015	58,64	33,33	4	51.138.966	23.494.252	27.644.714
	2016	58,64	33,33	4	75.952.611	23.558.754	52.393.857
	2017	70,03	33,33	4	31.813.498	18.479.528	13.333.970
IGAR	2013	84,82	33,33	3	48.442.303.122	13.411.886.964	35.030.416.158
	2014	84,82	33,33	3	75.826.220.743	20.927.345.985	54.898.874.758
	2015	84,82	0	3	63.236.346.206	11.820.161.899	51.416.184.307
	2016	84,82	33,33	3	95.774.588.017	26.468.958.222	69.305.629.795
	2017	84,82	33,33	3	95.764.791.063	23.388.107.927	72.376.683.136

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			TAX AVOIDANCE		
		KI	DKI	KA	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak
IMPC	2013	97,70	0	3	247.652.542.758	61.984.501.284	18.668.041.474
	2014	67,37	50	3	355.326.184.689	65.527.472.878	289.798.711.811
	2015	67,37	50	3	147.204.866.336	17.445.790.361	129.759.075.975
	2016	67,37	33,33	3	164.796.167.232	38.973.036.457	125.823.130.775
	2017	89,32	33,33	3	111.423.979.247	20.120.487.307	91.303.491.940
JPFA	2013	57,62	33,33	3	895.947.000	255.310.000	640.637.000
	2014	57,62	33,33	3	542.549.000	157.703.000	384.846.000
	2015	57,95	50	3	697.677.000	173.193.000	524.484.000
	2016	63,09	40	3	2.766.591.000	594.983.000	2.171.608.000
	2017	63,11	33,33	3	1.740.595.000	632.785.000	1.107.810.000
KDSI	2013	75,68	50	3	47.175.692.006	11.172.919.812	36.002.772.194
	2014	75,68	50	3	57.978.111.301	13.488.971.936	44.489.139.365
	2015	75,68	40	3	14.890.268.268	3.419.704.975	11.470.563.293
	2016	75,68	40	3	63.697.916.133	16.570.567.066	47.127.349.067
	2017	78,44	40	3	93.363.070.902	24.397.862.353	68.965.208.549
SMBR	2013	76,24	0	5	400.401.904	88.218.068	312.183.836
	2014	76,24	0	5	394.651.537	66.315.221	328.336.316
	2015	76,24	60	3	443.414.252	89.234.190	354.180.062
	2016	76,24	60	3	349.280.550	90.190.025	259.090.525
	2017	76,24	20	3	208.947.154	62.298.722	146.648.432

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 22 perusahaan bahwa lebih dominan yang mengalami naik turun pertahunnya dalam persentase kepemilikan institusional. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan saham maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan khurana dan moser dalam (Annisa & Kurniasih, 2012)

Dari data diatas dapat dilihat dari 22 perusahaan lebih dominan mengalami nilai yang tetap pertahunnya. Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang

saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Pohan, 2008).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata dari 22 perusahaan memiliki 3 keatas jumlah komite audit, Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi Siallagan dan Machfoez dalam (Winata, 2014).

Dan beban pajak pada perusahaan tersebut lebih dominan mengalami naik turun pertahunnya. perusahaan yang berkode LMSH, NIKL, INCI, JPFA, KDSI, mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Maka jika laba sebelum pajak besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karna laba yang besar menyebabkan beban pajak yang besar pula, maupun perusahaan berskala kecil tidak dapat mengolah beban pajak nya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim Nicodeme, 2007 dalam (Hakim, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Adhelia, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun demikian, hasil pengujian yang

berbeda didapatkan oleh (Fadhilah, 2014). bahwa persentase anggota Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Dari data yang sudah dapat diatas bahwa pennulis bertujuan melakukan penelitian apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya naik turun nilai kepemilikan saham dari 22 perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 tersebut.
2. Terjadinya peningkatan jumlah dewan komisaris independen dari 22 perusahaan pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia di BEI Tahun 2013-2017.
3. Terjadinya peningkatan komite audit yang memiliki jumlah 3 keatas di setiap tahunnya dalam 10 perusahaan dan terdapat 1 perusahaan tidak tercapai target jumlah komite auditnya pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia di BEI Tahun 2013-2017
4. Adanya naik turun beban pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia di BEI Tahun 2013-2017.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya maka penelitian hanya membahas tentang *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan proksi Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Sedangkan perusahaan yang menjadi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah adanya pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional) terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah adanya pengaruh *good corporate governance* (dewan komisaris independen) terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah adanya pengaruh *good corporate governance* (komite audit) terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah adanya pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit secara bersama terhadap *tax avoidance*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini membuktikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional) terhadap pehindaran pajak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* (Dewan Komisaris Independen) terhadap peghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* (Kommite Audit) terhadap peghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara keseluruhan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kmite audit terhadap penghindaran pajak

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penyusun dalam memahami tentang *Tax Avoidance* dan dapat mengadakan pertandingan antara teori-teori yang telah dapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan serta sejauh mana teori tersebut dapat diaplikasikan.
2. Bagi perusahaan, untuk manajemen perusahaan dapat menjadikan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pegaruh *Good Corporate Governance* terhadap kegiatan *Tax Avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam perusahaan perpajakan antra kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.
3. Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai *Tax Avoidance* dan mendukung peneliti yang dilakukan sebellumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan informasi untuk penelitian yang akan silakukan berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditor, dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya Hendra dalam (Fadhilah, 2014). Sedangkan Organization for Economic Corporation and development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Corporate governance juga¹³ yaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency*

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

2. *Accountability*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra *bisnis strategic* berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit).

3. *Responsibility*

Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

4. *Independency*

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness*

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi

kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi.

c. Manfaat Good Corporate Governance

Dengan melaksanakan *good corporate governance*, menurut *forum of corporate governance in Indonesian* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

Menurut (Zarkasyi, 2008) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* yaitu:

1. *GCG* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. *GCG* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

d. Peraturan Good Corporate Governance

Beberapa peraturan *good corporate governance* yang diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), yaitu :

1. Meluncurkan *road map* tata kelola perusahaan
2. Mengeluarkan aturan / revisi aturan yang ada baru berlaku untuk perusahaan publik:
 - a. Komite audit
 1. Rekomendasi penunjukan auditor eksternal
 - b. Laporan tahunan
 1. Pengungkapan langsung dan tidak langsung dari pemegang saham pengendali
 2. Keterangan lebih rinci dari tanggung jawab perusahaan
 3. Pengungkapan biaya audit, non-biaya audit
 - c. RUPS

1. Keterangan lebih rinci pemberitahuan RUPS
 2. Pengungkapan ringkasan menit dari RUPS
- d. Dewan komisaris dan direksi
1. Pembatasan jumlah direktur di perusahaan lain untuk anggota direksi dan dewan komisaris
 2. Jumlah pertemuan dan rapat gabungan direksi, dewan komisaris
 3. Pembatasan masa jabatan komisaris independen
 4. Evaluasi kinerja komite di bawah dewan komisaris dan direksi kode etik
- e. Pencalonan dan komite remunerasi (NRC)
1. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk nominasi dan remunerasi fungsi, mungkin didukung oleh NRC
 2. Komposisi dan tugas NRC
 3. Evaluasi kinerja anggota dewan komisaris dan direksi
- f. Website untuk perusahaan publik
- g. Pedoman *GCG* untuk perusahaan yang terdaftar

e. Mekanisme Good Corporate Governance

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham oleh lembaga keuangan non bank, lembaga hukum, yayasan, institusi luar negeri dan lembaga lainnya pada akhir tahun. Data kepemilikan institusional dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan setiap

tahunnya. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan aspek ekonomi entitas yang beroperasi secara individu tetapi berada dalam satu pengendalian. Struktur kepemilikan institusi menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan Putri and Christiana, 2017 dalam (Jufrizen & Dkk, 2019).

2. Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari, 2014).

Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak, dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Namun dengan adanya dewan komisaris independen hal tersebut dapat dihindari, karena komisaris independen dapat melakukan fungsi pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014)

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAM, 2015)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang corporate governance adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang – undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktek solusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan Watts dan Zimmerman dalam (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Budiman dan Setiyono dalam (Damayanti & Susanto, 2016) mengatakan tax avoidance usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Mardiasmo, 2009) penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan menurut (Suandy, 2011) penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya adalah pajak dianggap sebagai beban hidup, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab, petugas pajak yang mudah disuap, tidak ada jaminan pajak digunakan sebagaimana semestinya, sanksi yang diberikan kepada para pelanggan pajak kurang tegas, kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan WP, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam meng-update PP terbaru, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

b. Cara Penghindaran Pajak

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks dalam (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memmemberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
3. Ketentuan anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*genaral anti avoidance rule*).

3. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam penelitian maka perlu untuk membahas hasil-hasil penelitian tedahulu sebagai acuan dalam membandingkan penelitian saat ini denngan penelitian terdahulu sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai dengan tentu.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmi Fadhila (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011	Dari hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa proporsi kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur.
2	Rizal Ardiyansyah (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> perbankan Syariah Di Indonesia periode 2011-2015	Dari hasil penelitian ini <i>Corporate Governanace</i> yang diukur dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang dilakuka perusahaan. <i>Corporate Governanace</i> yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Wirna Yola Gusti (2014)	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2009-2012	Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa berdasarkan uji yang dilakukan hipotesis variabel <i>Good Corvorate Governance</i> berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Hidayana (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang teliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan dan menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landaan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari landasan teori yang dihubungkan dengan variable yang diteliti.

Dalam hal ini penelitian ini menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang digunakan adalah tax avoidance yang diukur dengan menggunakan penghitungan *cash effective tax rate* (CETR), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dimana mekanismenya diukur dengan Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

Dari pemaparan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun Wahyudi dan Pawestri dalam (Simarmata, 2014) Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser dalam (Annisa & Kurniasih, 2012) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term Shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*longterm shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 dalam (Widyati, 2013)

Semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham. Sedangkan dari perspektif stakeholder, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder* (Sandy & Lukviarman, 2015).

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*)

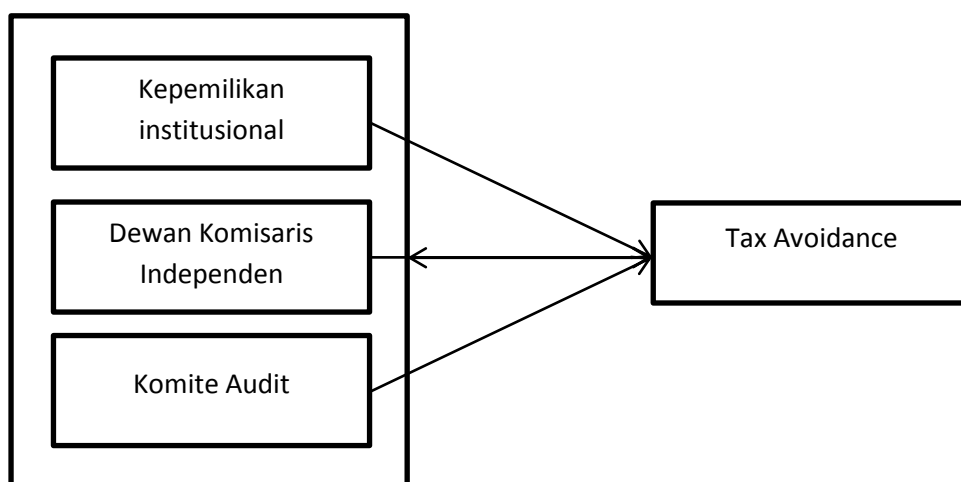
Keberadaan komite audit diukur menggunakan variabel *dummy* yang diberi angka 1 jika terdapat komite audit, dan diberi angka 0 jika tidak terdapat komite audit (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Komite audit berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite Audit diukur dengan Jumlah anggota komite audit.

Maharani dan Suardana, Dewi dan Jatidalam (Annisa & Kurniasih, 2012) Membuktikan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Good Corporate Governance diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi dimana peranan penghindaran pajak, para pemegang saham, dewan komisarin independen dan komite audit dapat bersinegri untuk mewujudkan efisiensi yang diharapkan. (Meca, P, & Ballesta, 2009) menemukan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas akan digambarkan didalam kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 1
Kerangka konseptual

C. Hipotesis

Dari hasil kerangka konseptual maka dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).
2. Adakah pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).
3. Adakah pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).

4. Adakah pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berbentuk penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2017) “Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015) Sementara penelitian berbentuk asosiatif adalah menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lain yang akan diteliti. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

B. Defenisi Operasioanl Variabel

Dalam penelitian ini, penulis memiliki operasional variabel. Penulis menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*variabel independen*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dimana mekanismenya diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Berdasarkan uraian diatas maka, berikut adalah tabel dari definisi masing-masing variabel yang terdapat pada penelitian ini.

Tabel III.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator (alat Ukur)
Independen Penghindaran pajak (Y)	Menurut Budiman dan Setiyono (2012) mengatakan tax avoidance usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pengukuran tax avoidance menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.	Persentase Kepemilikan saham oleh institusi lain diluar Perusahaan CETR= $\frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Dependen Kepemilikan Institusional (X1)	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya,2014). Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dalam Fadhilah,2014).	Persentase Kepemilikan saham oleh institusi lain diluar Perusahaan KI= $\frac{\text{Kepemilikan saham institusional}}{\text{Saham Beredar}}$
Dewan Komisaris Independen (X2)	Dewan Komisaris Independen adalah seseorang tidak terafiliasi dalam hal apapun dengan pemegang saham, direksi dan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan.	Menghitu jumlah komisaris yang ada pada erusahaan DKI= $\frac{\text{Jumlah komisaris IndeKenden}}{\text{Total Komisaris}}$

Komite Audit (X3)	Dalam menerapkan <i>corporate governance</i> , keberadaan komite audit sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas auditor internal dan eksternal. Menurut Dhaliwal (2003) dalam Reza (2012) frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya <i>corporate governance</i> dalam komite audit	Menghitung Jumlah anggota komite audit
-------------------	--	--

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang diambil oleh penulis adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan web-web resmi perusahaan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Berikut penjelasan waktu penelitian dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.2
Rincian waktu penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019																							
		Des				Jan				Feb				Maret-Ags				Sep-Okt							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengumpulan Data Awal	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
5	Seminar Proposal													■	■	■	■								
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Tabel III.3
Populasi Dalam Penelitian

Sub Sektor	Kode Saham	Nama Perusahaan
Sub sektor semen	INTP	Indocement tunggal prakasa tbk
	SMBR	Semen baturaja (persero) tbk
	SMCB	Holcim Indonesia tbk
	SMGR	Semen indonesia tbk
	WSBP	Waskita beton procast tbk
	WTON	Wijaya karya beton tbk
Keramik, porselin dan kaca	AMFG	Asahimas flat glass tbk
	ARNA	Arwana citra mulia tbk
	IKAI	Inti keramik alam asri industry
	KIAS	Keramika indonesia assosiasi tbk
	MARK	Mark dynamics indonesia tbk
	MLIA	Mulia industrindo tbk
	TOTO	Surya toto indonesia tbk
Logam dan Sejenisnya	ALKA	Alaska Industrindo Tbk
	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk
	BTON	Brton Jaya Manunggal Tbk
	CTBN	Citra Turbindo Tbk
	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
	ISSP	Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk
	JKSW	Jakarta Kyooi Steel Work LTD Tbk
	KRAS	Krakatau Stool Tbk
	LION	Lion Metal Works Tbk
	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	
Kimia	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
	BRPT	Banto Pasific Tbk
	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
	EKAD	Ekadharma International Tbk
	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
	INCI	Intan Wijaya International Tbk
	SRSN	Indo Acitama Tbk
	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk

Plastik dan Kemasan	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
	APLI	Asiaplast Industries Tbk
	BRNA	Berlina Tbk
	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk
	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
	SIMA	Siwani Makmur Tbk
	TALF	Tunas Alfin Tbk
	TRST	Trias Semtosa Tbk
	YPAS	Yana Prima Hasta Persada Tbk
Pekan Ternak	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
	SIPD	Siearad Produce Tbk
Kayu dan pengolahannya	SULI	SLJ Global Tbk
	TIRT	Tirta mahakam resources tbk
Pulp dan Kertas	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
	INKP	Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk
	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk
	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Tbk
	KDSI	Kedaung Setia Industrial Tbk
	SPMA	Suparma Tbk
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	

Sumber: Bursa Efek Indonesia

2. Sampel Penelitian

“Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu” (Sugiono, 2012)

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
kriteria Sampel

NO	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar BEI tahun 2013-2017	64
2	Laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah dalam periode 2013-2014	54
3	Laporan keuangan yang memiliki laba bersih 3 tahun berturut-turut	22
Total		22

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan dari sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. Ada pun yang dijadikan sampel sebagai berikut:

Tabel III.5
Sampel Penelitian Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
2	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk
3	LMSH	Lionmesh prima Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia Tbk
5	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
6	WSBP	Waskita Beton Prrocast Tbk
7	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
8	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
9	AMFG	Asahimas flat glass tbk
10	ARNA	Arwana citra mulia tbk
11	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
12	LION	Lion Metal Works Tbk

Lanjutan Tabel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
13	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
14	EKAD	Ekadharna International Tbk
15	INCI	Intan Wijaya International Tbk
16	SRSN	Indo Acitama Tbk
17	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
18	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
19	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
20	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
21	KDSI	Kedaung Setia Industrial Tbk
22	SMBR	Semen Baturaja (persero) tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *eksplanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara sistematis.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan tahunan (*Annual Report*) dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang diperoleh melalui webside Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id tahun 2013-2017. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dilihat melalui laporan keuangan perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia dari tahun 2013-2017 mengenai variabel yang akan diteliti yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris Independen dan komite audit. Pada penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan web-web terkait lainnya.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

“Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi yang dihasilkan dari masing-masing variabel penelitian” (Ghozali, 2011)

2. Uji Asumsi Klasik

“Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terpenuhi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian” (Widarjono, 2010).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengukur apakah didalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2011)

Untuk mendeteksi uji normalitas yaitu dengan analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara

data observasi dengan dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal Probability Plot (*p-p plot*) yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).

b. Uji multikolonialitas

“Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelas antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen” (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilibatkan dari nilai *tolerance* dan VIF (Variance Inflation Factor). “Kedua ukuran itu menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10 , nilai tersebut menunjukkan adanya multikolonialitas” (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas model regresi yang baik adalah homoskedastisitas” (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan da tidaknya pada tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pada tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakratan hasil. Uji statistik yang di gunakan adalah uji *rank spearman*. uji heteroskedastisitas juga dapat diketahui dari nilai signifikansi korelasi rank spearman antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). “Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi” (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin Watson* (DW).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Kriteria Autikorelasi *Durbin Watson* (DW)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak	$0 < DW < d_L$
Tidak ada autokorelasi Positif	No Decision	$d_L \leq DW \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak	$4 - d_L < DW < 4$
Tidak ada autokorelasi Positif	No Decision	$4 - d_L \leq DW < 4 - d_U$
Tidak ada autokorelasi Positif Atau Negatif	Tidak ditolak	$d_U < DW < 4 - d_U$

Sumber: Ghozali, 2011

3. Uji Hipotesis

“Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda pada kasus regresi berganda terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen” (Santoso, 2009).

Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan alat analisis berupa koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t.

a. Uji Simulasi (Uji Statistik F)

“Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat” (Ghozali, 2011).

Menurut (Ghozali, 2011) kriteria pengamilan keputusan adalah sebagai berikut

1. Jika nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%, H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada FF tabel, maka H_0 ditolak atau H_a .

b. Uji Parsial (Uji t)

“Uji statistis t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen” (Ghozali, 2011).

Menurut (Ghozali, 2011) uji t dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika jumlah degree of freedom (df) adalah ≥ 20 pada derajat kepercayaan sebesar 5% dan ilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai statistik r hitung lebih tinggi dibandingkan t tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 atau ($0 < x < 1$). nilai R^2

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. “Secara umum koefisien determinasi untuk data ulang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi” (Ghozali, 2011).

4. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan skala pengukuran yang bersifat metrik (interval atau rasio) untuk kedua variabel tersebut (Ghozali, 2011).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Indeks Skor Pengungkapan
- X₁ = Kepemilikan Institusional (KI)
- X₂ = Dewan Komisaris Independen (DKI)
- X₃ = Komite Audit
- X₄ = Ukuran Perusahaan
- a = Konstanta
- b_{1,2,3,4} = Koefisien Regresi
- e = Error

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia selama periode 2013-2017. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Serta pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 64 perusahaan. Dan dari 64 perusahaan tersebut ada 22 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini, yaitu salah satunya perusahaan tersebut memiliki data keuangan dan data statistik selama periode 2013-2017 lengkap dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah GCG berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berikut ini adalah 22 perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV.1
Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
2	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
3	LMSH	Lionmesh prima Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia Tbk
5	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
6	WSBP	Waskita Beton Prrocast Tbk
7	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
8	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
9	AMFG	Asahimas flat glass tbk
10	ARNA	Arwana citra mulia tbk
11	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
12	LION	Lion Metal Works Tbk
13	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
14	EKAD	Ekadharna International Tbk
15	INCI	Intan Wijaya International Tbk
16	SRSN	Indo Acitama Tbk
17	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
18	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
19	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
20	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
21	KDSI	Kedaung Setia Industrial Tbk
22	SMBR	Semen Baturaja (persero) tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia

2. Deskripsi Data

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua hutang pajak yang ada dengan semua cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini *tax avoidance* diperbolehkan namun disisi lain tidak diingikan. *Tax avoidance* dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan rumus Cash ETR (*Cash Efective Tax Ratio*).

Variabel bebas (X_1) dalam penelitian ini adalah Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

Variabel bebas (X_2) dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen adalah seseorang tidak terafiliasi dalam hal apapun dengan pemegang saham, direksi dan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan.

Variabel bebas (X_3) dalam penelitian ini adalah Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

Berikut ini adalah perhitungan kepemilikan institsional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), dan Komite Audit (KA) pada masing-masing perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017:

Tabel IV.2
Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI),
Komite Audit (KA) dan Cash ETR pada Perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Dasar dan Kimia

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			CETR
		KI	DKI	KA	
BUDI	2013	48	33,33	3	8,88840
	2014	48	33,33	3	2,90133
	2015	50,07	33,33	3	1,65460
	2016	53,40	33,33	3	3,71847
	2017	53,40	33,33	3	3,98147
INTP	2013	64,03	42,86	3	4,16661
	2014	64,03	42,86	3	4,47972
	2015	64,03	42,86	3	4,38272
	2016	51	42,86	3	15,05789
	2017	51	42,86	3	5,35090
LMSH	2013	74,41	33,33	3	3,84540
	2014	74,82	33,33	3	3,05432
	2015	74,41	33,33	3	2,04387
	2016	76,31	33,33	3	2,97174
	2017	79,35	33,33	3	3,86812
SMGR	2013	51,01	33,33	4	4,41888
	2014	51,01	42,86	4	4,67362
	2015	51,01	28,57	4	4,41418
	2016	51,01	28,57	4	9,25175
	2017	51,01	28,57	4	3,90400
TOTO	2013	96,21	25	3	3,73012
	2014	96,21	40	3	4,33570
	2015	92,36	40	3	3,96082
	2016	92,36	40	3	3,03688
	2017	92,36	40	3	3,82538
WSBP	2013	269,93	33,33	4	2,51285
	2014	267,28	33,33	4	3,01097
	2015	191,56	33,33	4	3,66851
	2016	191,55	33,33	4	6,29331
	2017	191,54	33,33	4	11,02586

Lanjutan Tabel

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			CETR
		KI	DKI	KA	
WTON	2013	65,15	33,33	5	2,59149
	2014	65,05	33,33	6	2,88096
	2015	65,05	28,57	5	2,77941
	2016	65,05	33,33	5	15,38108
	2017	65,05	33,33	5	13,76033
NIKL	2013	65	20	4	3,37210
	2014	65	33,33	4	2,95922
	2015	65	33,33	5	2,52489
	2016	65	33,33	4	3,14559
	2017	65	20	4	3,45500
AMFG	2013	84,73	33,33	4	4,01044
	2014	84,73	33,33	4	4,29545
	2015	84,82	33,33	4	3,77704
	2016	84,82	33,33	3	3,95566
	2017	84,83	33,33	3	2,54153
ARNA	2013	50,47	66,67	4	4,02216
	2014	54,83	66,67	4	4,01690
	2015	48,09	33,33	4	3,92992
	2016	51,29	33,33	4	3,81482
	2017	51,30	66,67	4	3,77564
INAI	2013	76,58	50	3	1,79142
	2014	78	50	3	3,06271
	2015	78	50	3	2,00412
	2016	78	50	3	2,57701
	2017	78	50	3	3,83363
LION	2013	57,70	33,33	3	4,19561
	2014	57,70	33,33	3	4,53646
	2015	57,70	33,33	3	4,70128
	2016	57,70	33,33	3	4,43546
	2017	57,70	33,33	3	1,85223
DPNS	2013	66,42	33,33	3	4,25766
	2014	59,64	33,33	3	6,45213
	2015	59,87	33,33	3	5,99743
	2016	59,87	33,33	3	5,39266
	2017	59,87	33,33	3	4,71591

Lanjutan Tabel

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			CETR
		KI	DKI	KA	
EKAD	2013	75,45	50	3	4,14657
	2014	75,45	50	3	3,27037
	2015	75,45	50	3	3,44154
	2016	76,32	50	3	4,26640
	2017	76,81	50	3	3,88035
INCI	2013	46,41	33,33	3	29,77883
	2014	46,36	33,33	3	34,36429
	2015	46,41	33,33	3	8,50478
	2016	48,87	33,33	3	4,02151
	2017	48,87	33,33	3	3,99723
SRSN	2013	77,98	37,5	3	1,95931
	2014	77,98	37,5	3	1,93861
	2015	77,98	37,5	3	3,97604
	2016	68	37,5	3	0,18023
	2017	55,54	37,5	3	14,92885
AKPI	2013	58,64	33,33	4	2,08881
	2014	58,64	33,33	4	2,30831
	2015	58,64	33,33	4	2,17666
	2016	58,64	33,33	4	3,22397
	2017	70,03	33,33	4	1,72155
IGAR	2013	84,82	33,33	3	3,61189
	2014	84,82	33,33	3	3,62331
	2015	84,82	0	3	5,34987
	2016	84,82	33,33	3	3,61837
	2017	84,82	33,33	3	4,09459
IMPC	2013	97,70	0	3	3,99539
	2014	67,37	50	3	5,42255
	2015	67,37	50	3	8,43784
	2016	67,37	33,33	3	4,22847
	2017	89,31	33,33	3	5,53784
JPFA	2013	57,62	33,33	3	3,50925
	2014	57,62	33,33	3	3,44032
	2015	57,95	50	3	4,02832
	2016	63,09	40	3	4,64987
	2017	63,11	33,33	3	2,75069

Lanjutan Tabel

Kode Perusahaan	Tahun	GCG			CETR
		KI	DKI	KA	
KDSI	2013	75,68	50	3	4,22232
	2014	75,68	50	3	4,29819
	2015	75,68	40	3	4,35426
	2016	75,68	40	3	3,84404
	2017	78,44	40	3	3,82670
SMBR	2013	76,24	0	5	4,53877
	2014	76,24	0	5	5,95115
	2015	76,24	60	3	4,96911
	2016	76,24	60	3	3,87272
	2017	76,24	20	3	3,35396

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan dari data diatas bahwa kepemilikan institusional dari setiap perusahaan tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan yang mengalami nilai yang sama dalam 22 perusahaan ada 9 perusahaan. Sementara yang mengalami kenaikan ada 9 perusahaan yaitu BUDI, LMSH, ARNA, EKAD, INCI, AKPI, IMPC, JPFA, KDSI dan 3 perusahaan lainnya mengalami penurunan dalam kepemilikan saham.

Kemudian Dewan Komisaris Independen cenderung tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, dari perusahaan yang mengalami kenaikan ada 2 perusahaan yaitu dengan kode WTON, ARNA dan yang mengalami penurunan ada 2 perusahaan yaitu dengan kode SMGR, NIKL sementara perusahaan lainnya 18 perusahaan tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

Kemudian dari data diatas Komite audit tidak cenderung memiliki jumlah dibawah 3. Pohan, 2008 dalam (Annisa & Kurniasih, 2012) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk

komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Sedangkan *Cash Effective Ratio* mengalami kenaikan, dari 22 perusahaan 12 yang mengalami kenaikan. Sedangkan yang mengalami penurunan ada 10 perusahaan. Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki nilai *Cash ETR* yang meningkat dikatakan baik, sementara perusahaan yang nilainya turun dikatakan tidak baik. Karena menurut sebuah teori menyatakan bahwa jika tarif pajak penghasilan badan dibawah 25% diindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* dan sebaliknya.

3. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *tax avoidance*. Berikut ini hasil uji statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian ini :

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif GCG (Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI (x1)	110	46,36	269,93	74,8090	35,80790
DKI (x2)	110	,00	66,67	36,3690	11,34651
KA (x3)	110	3	6	3,40	,652
CETR (y)	110	,18	34,36	4,8812	4,52327
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan. Variabel independen dalam analisis deskriptif ini, yaitu kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 46,36 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 269,93 dan nilai rata-rata nya 74,8090 dan Std. Deviation nilainya 35, 80790. Sementara variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,00 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 66,67. sedangkan nilai rata-ratanya 36,3690 dan std. deviationnya 11,34651. Sementara variabel ukuran komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3 orang dan nilai maksimum sebesar 6 orang. Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 3,40 yang berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki anggota komite audit sebanyak 3 orang. Variabel dependen dalam analisis deskriptif ini, yaitu *Tax Avoidance* yang memiliki nilai minimum sebesar 0,18 yang mengindikasikan semakin kecilnya peluang terjadinya *tax avoidance* sedangkan nilai maksimum sebesar 34,36 mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Nilai rata-rata pada penelitian

ini sebesar 4,8812 yang menunjukkan bahwa potensi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan cukup tinggi.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak (Fadhilah, 2014). Pengujian data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-smirnov (KS) dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,005$ dimana:

1. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal
2. Jika $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal

Tabel IV.4
Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,48607669
Most Extreme Differences	Absolute	,305
	Positive	,305
	Negative	-,210
Test Statistic		,305
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Olahan SPSS

Dari hasil data diatas uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* pada tabel IV.4 dapat diketahui bahwa pengaruh GCG terhadap Tax Avoidance berdistribusi tidak normal. Hal ini dapat dilihat dari *Asymp (2-tailed)* pada tabel 0,000 yang artinya $< 0,05$ sehingga dapat ditransformasikan dengan *Outlier*.

“Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi” (Ghozali, 2011). Ada empat penyebab timbulnya data outlier (1) kesalahan dalam mengentri data, (2) gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer, (3) outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi (4) outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi secara normal.

Setelah dihitung diketahui bahwa ada 29 sampel yang memiliki nilai ekstrim yang dikatakan sebagai outlier, maka dari 29 sampel tersebut harus dibuang dari beberapa perusahaan di beberapa tahunnya agar data dalam uji normalitas ini dapat berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil uji tes normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* data setelah di transformasikan dengan *outlier* dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel IV.5
Uji Normalitas dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov*
Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96325648
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,073
	Negative	-,103
Test Statistic		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		,033 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Olahan SPSS

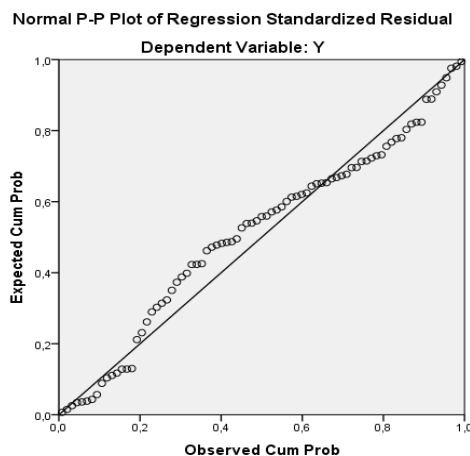
Dari hasil uji normalitas data yang telah ditransformasikan dapat dilihat bahwa diperoleh besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,200. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,033 > 0,05$) maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran data (titik) pada normal *P-plot of regression standized residual* variable independen dimana :

- a.** Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b.** Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dan distribusi data yang normal tersebut dapat dilihat melalui grafik normal *p-plot* data sebagai berikut :

Tabel IV.6
Grafik Normal *P-Plot*



Sumber: Data Olahan SPSS

Pada gambar grafik normal *P-Plot* diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ini ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen. Uji multikoleniaritas terjadi karena adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas (X) dalam model regresi. Uji multikolinieritas juga terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikoleniaritas.
- b. Bila $VIF < 10$, berarti tidak terdapat multikoleniaritas.
- c. Bila Tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikoleniaritas.

d. Bila Tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikoleniaritas

Berikut ini tabel uji multikoleniaritas yang akan menjelaskan apakah ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebas (X) :

Tabel IV.7
Uji Multikoleniaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X ₁	,913	1,095
	X ₂	,856	1,169
	X ₃	,850	1,176

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Data Olahan spss

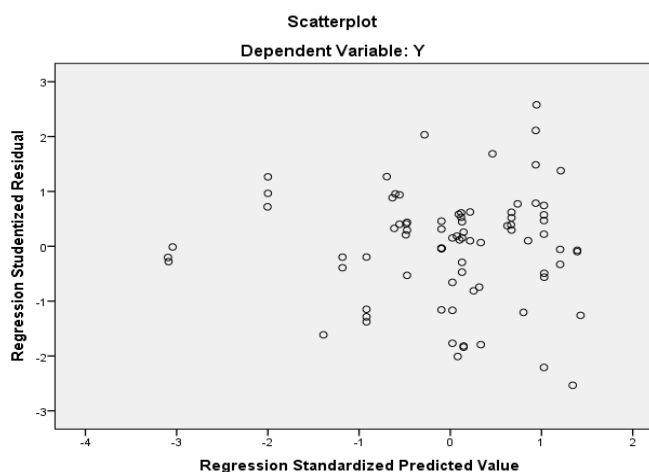
Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel kepemilikan institusional (X₁) sebesar 1,095, sedangkan vaiabel dewan komisaris independen (X₂) sebesar 1,169 dan variabel komite audit (X₃) sebbesar 1,176. Yang artinya nilai dari variabel kepemilikan institusional $1,095 < 10$, dewan komisaris independen $1,169 < 10$, komite audit $1,176 < 10$. Demikian juga dengan nilai *tolerance* pada variabel kepemilikan institusional sebesar 0,913, variabel dewan komisaris independen sebesar 0,856 dan variabel komite audit sebesar 0,850. Jadi masing-masing variabel pada nilai *Tolerance* $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikoleneartitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *Tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan

bahwa analisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi linear berganda.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pada tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pada tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel IV.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil scatterplot di atas diketahui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian data disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada satu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson. Berikut yang menyajikan hasil uji Durbin-Watson. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai dW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika nilai dW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika nilai dW diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

Berikut ini adalah hasil tabel yang akan menjelaskan uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,291 ^a	,085	,049	,98184	1,149

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan dari data diatas menjelaskan bahwa nilai durbin watson adalah 1,149 yang artinya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan durbin watson berada diantara -2 sampai 2, yakni $2 < 1,149 < 2$ maka nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi.

c. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F dilakukan dengan cara quick look, yaitu melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai sig F $> 0,005$ maka hipotesis diterima
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai sig F $< 0,005$ maka hipotesis ditolak

Berikut ini adalah tabel perhitungan dari uji F sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6,871	3	2,290	2,376	,076 ^b
Residual	74,229	77	,964		
Total	81,100	80			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji F variabel independen (X) tidak dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan $0,076 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen. Dasar keputusan yang diambil adalah dengan melihat tingkat signifikan kurang dari 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
2. H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Berikut ini tabel perhitungan Uji t (Uji Parsial) yang akan dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	6,455	1,304		
X ₁	-,012	,009	-,157	-1,380	,172
X ₂	-,003	,018	-,019	-,162	,872
X ₃	-,559	,227	-,291	-2,462	,016

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil dari data diatas yang dilakukan uji t (uji parsial) bahwa kepemilikan institusional diperoleh nilai signifikan $0,172 > 0,05$ yang berarti variabel Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Sementara hasil pengujian variabel dewan komisaris independen diperoleh nilai signifikan $0,872 > 0,05$ yang berarti variabel dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Dan hasil pengujian variabel komite audit diperoleh nilai $0,016 < 0,05$ yang berarti variabel komite audit secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi (antara nol dan satu) menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat, (Subramanyam & Wild, 2013). Berikut ini adalah hasil perhitungan dari uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 ^a	,085	,049	,98184

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R^2 diperoleh sebesar 0,085 atau sebesar 8,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 8,5% variasi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 disebabkan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian

ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, sedangkan 0,915 atau 91,5% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

d. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menyatakan penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

Berikut ini hasil data pengolahan data dengan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,455	1,304		4,949	,000
X ₁	-,012	,009	-,157	-1,380	,172
X ₂	-,003	,018	-,019	-,162	,872
X ₃	-,559	,227	-,291	-2,462	,016

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data pengolahan SPSS

Variabel dependen pada regresi ini adalah *Tax Avoidance* (Y), sedangkan variabel independen adalah Kepemilikan Institusional (X1) dan Dewan Komisaris Independen (X2) dan Komite audit (X3). Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

Keterangan :

Konstanta = 6,455

Kepemilikan Institusional = -0,012

Dewan Komisaris Independen = -0,003

Komite Audit = -0,559

Hasil tersebut dimasukkan kedalam bentuk persamaan regresi linear berganda sehingga diketahui persamaannya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6,455 + (-0,012)X_1 + (-0,003)X_2 + (-0,559)X_3 + e$$

Keterangan :

- a. Nilai konstanta sebesar 6,455 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstanta maka *tax avoidance* telah mengalami kenaikan sebesar 645,5%.
- b. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional (X_1) = -0,012 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan proporsi Kepemilikan Institusional akan diikuti oleh peningkatan *tax avoidance* sebesar 1,2% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstanta.
- c. Nilai koefisien Dewan Komisaris Independen (X_2) = -0,003 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan Proporsi Dewan Komisaris Independen akan diikuti Peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,3% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstanta.

d. Nilai koefisien Komite Audit (X_3) = -0,559 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa setiap penurunan Proporsi Dewan Komisaris Independen akan diikuti penurunan *tax avoidance* sebesar 55,9% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstanta.

B. Pembahasan

Dari hasil uji yang sudah dilakukan adalah mengenai hasil pengolahan data dengan menyesuaikan hasil uji dari setiap pengujian dengan teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan dari hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan analisis mengenai setiap variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil uji t (uji secara parsial) pada tabel IV. 11 variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham oleh institusi lain diluar perusahaan memperoleh nilai signifikan $0,172 > 0,05$. berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima sementara H_0 ditolak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap memenuhi kepentingannya sendiri Isnanta dalam (Winata, 2014)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Winata, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebab besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari.

Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Kedua, kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan

mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan tax avoidance.

Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan tax avoidance.

Tidak sejalan dengan penelitian Shleifer dalam Annisa dalam (Fadhilah, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri tapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh mengenai Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil uji t (uji secara parsial) pada tabel IV. 11 memiliki nilai signifikan $0,872 > 0,05$. Temuan ini memiliki

arti bahwa H1 diterima sementara H0 ditolak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Semakin besar presentase variabel dewan komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka Annisa dalam (Winata, 2014)

Penelitian ini mendukung pendapat Yermarck dan Jansen dalam (Hardiningsih, 2010) yang menyatakan bahwa makin banyaknya anggota dewan komisaris ada kecenderungan dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan karena kesulitan dalam komunikasi dan mengkoordinir kerja dari tiap anggota dewan itu sendiri serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Kedua, kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau

tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fadhilah, 2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dipeoleh mengenai Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil uji t (uji secara parsial) pada tabel IV. 11 memiliki nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Temuan ini memiliki arti bahwa H1 ditolak sementara H0 diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan termasuk komite audit yang bertugas dalam pengendalian kebijakan keuangan terutama dalam hal pajak di perusahaan.

Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yaitu: Pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang

dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Tidak sejalan dengan penelitian (Pohan, 2008) BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Sriwedari dalam (Juwika & Hani, 2015) juga menyatakan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.

4. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Mekanisme Good Corporate Governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kima yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil uji simultan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel

komite instituional, dewan komisaris independen, komite audit secara bersama-sama tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Tidak sejalan dengan pengujian oleh (Eksandy, 2017). Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang artinya bahwa kepemilikan saham, dewan komisaris independen dan komite audit jika dalam pengelolaan perusahaan harus membuat aturan yang berlaku agar penghindaran pajak tidak dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017, dengan sampel 22 perusahaan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji secara simultan mengenai pengaruh GCG dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit secara bersama-sama tidak ada pengaruh simultan terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil uji secara parsial mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Yang berarti bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan

pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional.

3. Hasil pengujian secara Parsial mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Yang berarti bahwa semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.
4. Hasil pengujian secara Parsial mengenai pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ini, maka dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam mengambil keputusan seharusnya investor mendalami dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan supaya tetap mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, karena melakukan penghindaran pajak tidak diperbolehkan dan berdampak buruk bagi perusahaan, investor, dan pemerintah.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain agar dapat membandingkan pengaruh atau tidak variabel-variabel tersebut
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia saja. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan lain yang juga memiliki *tax avoidance* yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governanve Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011). *Jurnal*, 5(2), 1–22.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 16–25.
- Ardila, I., & Fadhila, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 200–210.
- BAPEPAM, O. J. K. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Dengan*. <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.1127>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *ESENSI*, 5(2).
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Tanggerang*, 1(1), 96–112.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 25–39.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hakim, D. I. N. (2013). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hardiningsih, P. (2010). Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*, 2(1), 61–76.
- Jufrizen, & Dkk. (2019). Pengaruh Debt Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 7–18.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis* (F. Zulkarnain, Ed.). Medan: UMSU PRESS.
- Juwika, F. A., & Hani, S. (2015). Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Rfek Indonesia. *Jurnal Akuntansi DAN Bisnis*, 1(1), 35–48.
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage,

- Corporate Governance, Ukuran Perusahaana dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 10–28.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Andi.
- Meca, garcia, P, J., & Ballesta, S. (2009). Corporate Governance and Earnings Management: A Meta- Analysis. *Jurnal*, 17(5), 594–610.
- Pohan, H. T. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 111–123.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi. Universitas Mataram Lombok*, 17(1).
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10(2), 85–98.
- Santoso, S. (2009). *Business Forecasting: Metode Peramalan Bisnis Masa Kini Dengan Minitab & SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sari, G. M. (2014). Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Ekonomi*, 2(3), 1–25.
- Simarmata, A. P. P. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011- 2012)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (Buku 1 Edisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widarjono, A. (2010). *Analisis statistika multivariat terapan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Widyati, M. F. (2013). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(1), 1–16.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.



DATA STATISTIK

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 ^a	,085	,049	,98184

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,871	3	2,290	2,376	,076 ^b
	Residual	74,229	77	,964		
	Total	81,100	80			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,455	1,304		4,949	,000
	X1	-,012	,009	-,157	-1,380	,172
	X2	-,003	,018	-,019	-,162	,872
	X3	-,559	,227	-,291	-2,462	,016

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,7761	4,1015	3,6831	,29306	81
Std. Predicted Value	-3,095	1,428	,000	1,000	81
Standard Error of Predicted Value	,132	,386	,212	,053	81
Adjusted Predicted Value	2,7930	4,2119	3,6811	,29929	81
Residual	-2,42178	2,49190	,00000	,96326	81
Std. Residual	-2,467	2,538	,000	,981	81
Stud. Residual	-2,535	2,579	,001	1,003	81
Deleted Residual	-2,55726	2,57235	,00198	1,00755	81
Stud. Deleted Residual	-2,630	2,680	-,001	1,018	81
Mahal. Distance	,451	11,389	2,963	2,240	81
Cook's Distance	,000	,090	,011	,017	81
Centered Leverage Value	,006	,142	,037	,028	81

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

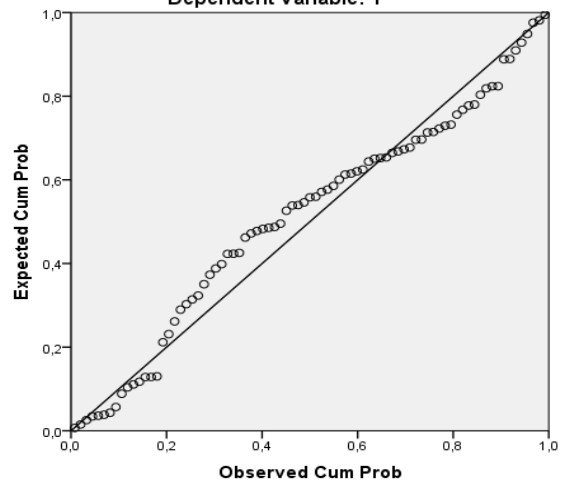
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96325648
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,073
	Negative	-,103
Test Statistic		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		,033 ^c

a. Test distribution is Normal.

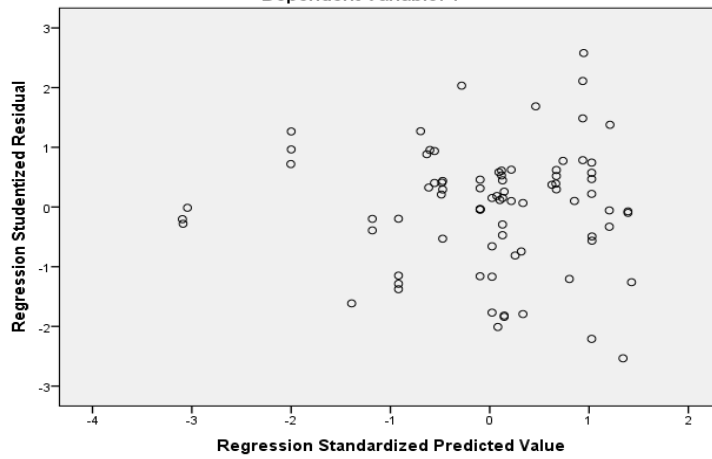
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



Scatterplot
Dependent Variable: Y



Data Perhitungan Kepemilikan Institusional (KI)

Kode Perusahaan	Tahun	Saham institusi	Jumlah saham beredar	Kepemilikan Institusional (KI)
BUDI	2013	2.159.440.831	4.498.997.362	47,99826844
	2014	2.159.440.831	4.498.997.362	47,99826844
	2015	2.252.568.831	4.498.997.362	50,06824076
	2016	2.402.568.831	4.498.997.362	53,40231695
	2017	2.402.568.831	4.498.997.362	53,40231695
INTP	2013	2.357.216.097	3.681.231.699	64,03335323
	2014	2.357.216.097	3.681.231.699	64,03335323
	2015	2.357.216.097	3.681.231.699	64,03335323
	2016	1.877.480.863	3.681.231.699	51,00143149
	2017	1.877.480.863	3.681.231.699	51,00143149
LMSH	2013	7.143.500	9.600.000	74,41145833
	2014	7.182.500	9.600.000	74,81770833
	2015	71.435.000	96.000.000	74,41145833
	2016	73.255.000	96.000.000	76,30729167
	2017	76.177.000	96.000.000	79,35104167
SMGR	2013	3.025.406.000	5.931.520.000	51,00557699
	2014	3.025.406.000	5.931.520.000	51,00557699
	2015	3.025.406.000	5.931.520.000	51,00557699
	2016	3.025.406.000	5.931.520.000	51,00557699
	2017	3.025.406.000	5.931.520.000	51,00557699
TOTO	2013	476.584.320	495.360.000	96,20968992
	2014	953.168.640	990.720.000	96,20968992
	2015	953.168.640	1.032.000.000	92,36130233
	2016	9.531.686.400	10.320.000.000	92,36130233
	2017	9.531.686.400	10.320.000.000	92,36130233
WSBP	2013	26.000.000.000	9.632.236.000	269,9269412
	2014	26.000.000.000	9.727.504.205	267,2833591
	2015	26.000.000.000	13.572.493.311	191,5639183
	2016	26.000.000.000	13.573.654.550	191,5475298
	2017	26.000.000.000	13.573.902.600	191,5440295

Kode Perusahaan	Tahun	Saham institusi	Jumlah saham beredar	Kepemilikan Institusional (KI)
WTON	2013	3.999.999.999	6.139.968.000	65,14691932
	2014	3.999.999.999	6.149.225.000	65,0488476
	2015	3.999.999.999	6.149.225.000	65,0488476
	2016	5.834.850.000	8.969.951.372	65,04884762
	2017	5.834.850.000	8.969.951.372	65,04884762
NIKL	2013	3.271.469.999	5.033.020.000	65,00013906
	2014	4.841.053.951	7.447.753.454	65,00019074
	2015	4.841.053.951	7.447.753.454	65,00019074
	2016	4.841.053.951	7.447.753.454	65,00019074
	2017	4.841.053.951	7.447.753.454	65,00019074
AMFG	2013	367.718.000	434.000.000	84,72764977
	2014	367.718.000	434.000.000	84,72764977
	2015	368.117.700	434.000.000	84,81974654
	2016	368.117.700	434.000.000	84,81974654
	2017	368.158.700	434.000.000	84,82919355
ARNA	2013	3.704.882.000	7.341.430.976	50,46539308
	2014	4.025.282.100	7.341.430.976	54,82966622
	2015	3.530.347.500	7.341.430.976	48,08800235
	2016	3.765.450.000	7.341.430.976	51,29040935
	2017	3.766.150.000	7.341.430.976	51,29994428
INAI	2013	121.309.500	158.400.000	76,5842803
	2014	247.064.000	316.800.000	77,98737374
	2015	247.064.000	316.800.000	77,98737374
	2016	247.066.700	316.800.000	77,98822601
	2017	494.129.400	633.600.000	77,9875947
LION	2013	30.012.000	52.016.000	57,6976315
	2014	30.012.000	52.016.000	57,6976315
	2015	300.120.000	520.160.000	57,6976315
	2016	300.120.000	520.160.000	57,6976315
	2017	300.120.000	520.160.000	57,6976315
DPNS	2013	219.924.173	331.129.952	66,41627303
	2014	197.485.870	331.129.952	59,63998992
	2015	198.235.935	331.129.952	59,86650673
	2016	198.235.935	331.129.952	59,86650673
	2017	198.235.935	331.129.952	59,86650673

Kode Perusahaan	Tahun	Saham institusi	Jumlah saham beredar	Kepemilikan Institusional (KI)
EKAD	2013	527.200.720	698.775.000	75,44641981
	2014	527.200.720	698.775.000	75,44641981
	2015	527.200.720	698.775.000	75,44641981
	2016	533.289.620	698.775.000	76,31778756
	2017	536.712.320	698.775.000	76,80760187
INCI	2013	84.010.989	181.035.556	46,405795
	2014	83.936.282	181.035.556	46,36452852
	2015	84.010.989	181.035.556	46,405795
	2016	88.476.608	181.035.556	48,87250326
	2017	88.476.608	181.035.556	48,87250326
SRSN	2013	4.694.421.652	6.020.000.000	77,98042611
	2014	4.694.421.652	6.020.000.000	77,98042611
	2015	4.694.421.652	6.020.000.000	77,98042611
	2016	4.093.850.845	6.020.000.000	68,00416686
	2017	3.343.558.424	6.020.000.000	55,54083761
AKPI	2013	398.747.943	680.000.000	58,63940338
	2014	398.747.943	680.000.000	58,63940338
	2015	398.747.943	680.000.000	58,63940338
	2016	398.747.943	680.000.000	58,63940338
	2017	476.175.852	680.000.000	70,02586059
IGAR	2013	824.612.420	972.204.500	84,81882361
	2014	824.612.420	972.204.500	84,81882361
	2015	824.612.420	972.204.500	84,81882361
	2016	824.612.420	972.204.500	84,81882361
	2017	824.612.420	972.204.500	84,81882361
IMPC	2013	425.000.000	435.000.000	97,70114943
	2014	325.638.000	483.350.000	67,37105617
	2015	325.638.000	483.350.000	67,37105617
	2016	3.256.380.000	4.833.500.000	67,37105617
	2017	4.317.042.954	4.833.500.000	89,31505025
JPFA	2013	6.130.699.735	10.640.198.170	57,61828527
	2014	6.130.699.735	10.640.198.170	57,61828527
	2015	6.165.985.835	10.640.198.170	57,94991537
	2016	7.186.031.335	11.390.198.170	63,08960764
	2017	7.186.031.335	11.386.157.970	63,111994

Kode Perusahaan	Tahun	Saham institusi	Jumlah saham beredar	Kepemilikan Institusional (KI)
KDSI	2013	306.488.500	405.000.000	75,67617284
	2014	306.488.500	405.000.000	75,67617284
	2015	306.488.500	405.000.000	75,67617284
	2016	306.488.500	405.000.000	75,67617284
	2017	317.691.000	405.000.000	78,44222222
SMBR	2013	7.500.000.000	9.837.678.500	76,23749851
	2014	7.500.000.000	9.837.678.500	76,23749851
	2015	7.500.000.000	9.837.678.500	76,23749851
	2016	7.500.000.000	9.837.678.500	76,23749851
	2017	7.500.000.000	9.837.678.500	76,23749851

Data Perhitungan Dewan Komisaris Independen (DKI)

Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen (DKI)
BUDI	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
INTP	2013	3	7	42,85714286
	2014	3	7	42,85714286
	2015	3	7	42,85714286
	2016	3	7	42,85714286
	2017	3	7	42,85714286
LMSH	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
SMGR	2013	2	6	33,33333333
	2014	3	7	42,85714286
	2015	2	7	28,57142857
	2016	2	7	28,57142857
	2017	2	7	28,57142857
TOTO	2013	1	4	25
	2014	2	5	40
	2015	2	5	40
	2016	2	5	40
	2017	2	5	40
WSBP	2013	2	6	33,33333333
	2014	2	6	33,33333333
	2015	2	6	33,33333333
	2016	2	6	33,33333333
	2017	2	6	33,33333333

Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen (DKI)
WTON	2013	2	6	33,33333333
	2014	2	6	33,33333333
	2015	2	7	28,57142857
	2016	2	6	33,33333333
	2017	2	6	33,33333333
NIKL	2013	1	5	20
	2014	2	6	33,33333333
	2015	2	6	33,33333333
	2016	2	6	33,33333333
	2017	1	5	20
AMFG	2013	2	6	33,33333333
	2014	2	6	33,33333333
	2015	2	6	33,33333333
	2016	2	6	33,33333333
	2017	2	6	33,33333333
ARNA	2013	2	3	66,66666667
	2014	2	3	66,66666667
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	2	3	66,66666667
INAI	2013	2	4	50
	2014	2	4	50
	2015	2	4	50
	2016	2	4	50
	2017	2	4	50
LION	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
DPNS	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333

Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen (DKI)
EKAD	2013	1	2	50
	2014	1	2	50
	2015	1	2	50
	2016	1	2	50
	2017	1	2	50
INCI	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	1	3	33,33333333
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
SRSN	2013	3	8	37,5
	2014	3	8	37,5
	2015	3	8	37,5
	2016	3	8	37,5
	2017	3	8	37,5
AKPI	2013	2	6	33,33333333
	2014	2	6	33,33333333
	2015	2	6	33,33333333
	2016	2	6	33,33333333
	2017	2	6	33,33333333
IGAR	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	0	2	0
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
IMPC	2013	0	1	0
	2014	1	2	50
	2015	1	2	50
	2016	1	3	33,33333333
	2017	1	3	33,33333333
JPFA	2013	1	3	33,33333333
	2014	1	3	33,33333333
	2015	2	4	50
	2016	2	5	40
	2017	2	6	33,33333333

Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen (DKI)
KDSI	2013	2	4	50
	2014	2	4	50
	2015	2	5	40
	2016	2	5	40
	2017	2	5	40
SMBR	2013	0	6	0
	2014	0	6	0
	2015	3	5	60
	2016	3	5	60
	2017	1	5	20

Data Komite Audit (KA)

Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
BUDI	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
INTP	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
LMSH	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
SMGR	2013	4
	2014	4
	2015	4
	2016	4
	2017	4
TOTO	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
WSBP	2013	4
	2014	4
	2015	4
	2016	4
	2017	4

Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
WTON	2013	5
	2014	6
	2015	5
	2016	5
	2017	5
NIKL	2013	4
	2014	4
	2015	5
	2016	4
	2017	4
AMFG	2013	4
	2014	4
	2015	4
	2016	3
	2017	3
ARNA	2013	4
	2014	4
	2015	4
	2016	4
	2017	4
INAI	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
LION	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
DPNS	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3

Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
EKAD	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
INCI	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
SRSN	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
AKPI	2013	4
	2014	4
	2015	4
	2016	4
	2017	4
IGAR	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
IMPC	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
JPFA	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3

Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
KDSI	2013	3
	2014	3
	2015	3
	2016	3
	2017	3
SMBR	2013	5
	2014	5
	2015	3
	2016	3
	2017	3

Data perhitungan Tax Avoidance (CETR)

Kode Perusahaan	Tahun	TAX AVOIDANCE			CETR
		Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak	
BUDI	2013	38.549.000	4.337.000	42.886.000	8,888402121
	2014	43.488.000	14.989.000	28.499.000	2,90132764
	2015	52.125.000	31.503.000	21.072.000	1,654604323
	2016	52.832.000	14.208.000	38.624.000	3,718468468
	2017	61.016.000	15.325.000	45.691.000	3,981468189
INTP	2013	6.595.154.000	1.582.860.000	5.012.294.000	4,166606017
	2014	6.814.636.000	1.521.220.000	5.293.416.000	4,479717595
	2015	5.644.576.000	1.287.915.000	4.356.661.000	4,382724015
	2016	4.145.632.000	275.313.000	3.870.319.000	15,05788684
	2017	2.287.274.000	427.456.000	1.859.818.000	5,350899274
LMSH	2013	19.437.691.207	5.054.792.013	14.382.899.194	3,845398813
	2014	11.006.796.283	3.603.680.847	7.403.115.436	3,054320499
	2015	3.807.172.880	1.862.729.485	1.944.443.395	2,043867835
	2016	9.424.028.642	3.171.213.831	6.252.814.811	2,971741782
	2017	17.488.236.349	4.521.122.499	12.967.113.850	3,868118228
SMGR	2013	6.920.399.734	1.566.101.213	5.354.298.521	4,41887132
	2014	7.090.765.967	1.517.188.688	5.573.577.279	4,673621695
	2015	5.850.923.497	1.325.482.459	4.525.441.038	4,414184026
	2016	5.084.621.543	549.584.720	4.535.036.823	9,251752019
	2017	2.746.546.363	703.520.449	2.043.025.914	3,904003596
TOTO	2013	323.204.864.975	86.647.351.813	236.557.513.162	3,730118211
	2014	381.882.728.642	88.078.819.693	293.803.908.949	4,335693076
	2015	381.573.896.617	96.337.115.985	285.236.780.659	3,960819179
	2016	251.320.891.921	82.756.308.203	168.564.583.718	3,036878969
	2017	377.660.867.510	98.725.062.966	278.935.804.544	3,82537986
WSBP	2013	611.200.634.867	243.230.405.572	367.970.229.295	2,512846342
	2014	765.959.248.175	254.389.167.647	511.570.080.528	3,010974309
	2015	1.398.004.123.804	381.082.141.290	1.047.590.672.774	3,668511253
	2016	2.155.589.073.419	342.520.456.635	1.813.068.616.784	6,293314842
	2017	4.620.646.154.705	419.073.663.951	4.201.572.490.754	11,02585667

Kode Perusahaan	Tahun	TAX AVOIDANCE			CETR
		Lab a Sebelum Pajak	Beban Pajak	Lab a Setelah Pajak	
WTON	2013	1.016.690.189	392.318.510	6 24.371.679	2,591491768
	2014	1.139.189.462	395.420.359	743.769.103	2,880958039
	2015	1.098.081.759	395.076.705	703.005.054	2,779414086
	2016	1.295.239.236	84.209.926	1.211.029.310	15,38107558
	2017	1.462.391.358	106.275.869	1.356.115.489	13,7603331
NIKL	2013	866.970.000.000	257.101.000.000	609.869.000.000	3,372098903
	2014	1.023.102.000.000	345.734.000.000	677.368.000.000	2,959217202
	2015	168.163.000.000	66.602.000.000	101.561.000.000	2,524894147
	2016	414.970.000.000	131.921.000.000	283.049.000.000	3,145594712
	2017	716.211.000.000	207.297.000.000	508.914.000.000	3,454999349
AMFG	2013	450.753.000	112.395.000	338.358.000	4,010436407
	2014	597.807.000	139.172.000	458.635.000	4,295454545
	2015	464.263.000	122.917.000	341.346.000	3,777044672
	2016	348.561.000	88.117.000	260.444.000	3,955661223
	2017	63.589.000	25.020.000	38.569.000	2,541526779
ARNA	2013	316.349.602.459	78.651.688.576	237.697.913.883	4,022159069
	2014	348.379.437.541	86.728.384.322	237.697.913.883	4,016902197
	2015	95.514.316.424	24.304.373.076	71.209.943.348	3,929923069
	2016	123.838.299.924	32.462.388.949	91.375.910.975	3,814823983
	2017	166.203.941.034	44.020.031.391	122.183.909.643	3,775643401
INAI	2013	11.361.992.726	6.342.451.995	5.019.540.731	1,791419586
	2014	32.752.754.293	10.694.053.533	22.058.700.759	3,062707157
	2015	57.114.061.880	28.498.388.713	28.615.673.167	2,004115477
	2016	58.097.472.991	22.544.497.747	35.552.975.244	2,577013409
	2017	52.292.073.203	13.640.368.683	38.651.704.520	3,833626086
LION	2013	85.027.065.076	20.265.714.260	64.761.350.816	4,195611563
	2014	62.857.739.316	13.856.109.214	49.001.630.102	4,536463905
	2015	58.451.801.513	12.433.164.026	46.018.637.487	4,701281298
	2016	54.671.394.698	12.325.977.643	42.345.417.055	4,435461128
	2017	20.175.438.794	10.892.495.785	9.282.943.009	1,852232876
DPNS	2013	87.322.830.461	20.509.600.140	66.813.230.321	4,257656408
	2014	17.183.018.745	2.663.152.461	14.519.866.284	6,452134828
	2015	11.832.026.060	1.972.849.888	9.859.176.172	5,997428457
	2016	12.288.056.506	2.278.665.403	10.009.391.103	5,392655056
	2017	7.568.252.565	1.604.832.494	5.963.420.071	4,715914336

Kode Perusahaan	Tahun	TAX AVOIDANCE			CETR
		Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak	
EKAD	2013	51.988.302.824	12.537.650.003	39.450.652.821	4,146574742
	2014	58.721.777.723	17.955.699.441	40.756.078.282	3,27036983
	2015	66.306.918.116	19.266.661.660	47.040.256.456	3,441536437
	2016	118.449.029.979	27.763.208.449	90.685.821.530	4,26640279
	2017	102.649.309.681	26.453.643.952	76.195.665.729	3,880346687
INCI	2013	10.690.815.380	359.007.284	10.331.808.096	29,77882582
	2014	11.358.760.719	330.539.707	11.028.221.012	34,36428507
	2015	19.220.641.866	2.259.981.843	16.960.660.023	8,504777118
	2016	13.294.748.095	3.305.911.836	9.988.836.259	4,021507153
	2017	22.077.467.345	5.523.195.214	16.554.272.131	3,997227418
SRSN	2013	32.666.954	16.672.659	15.994.295	1,959312789
	2014	29.857.990	15.401.730	14.456.260	1,93861274
	2015	20.714.663	5.209.875	15.504.788	3,976038389
	2016	1.688.362	9.367.689	11.056.051	0,180232499
	2017	18.969.208	1.270.641	17.698.567	14,9288493
AKPI	2013	66.416.762	31.796.426	34.620.336	2,088812183
	2014	61.206.366	26.515.662	34.690.704	2,308309934
	2015	51.138.966	23.494.252	27.644.714	2,176658614
	2016	75.952.611	23.558.754	52.393.857	3,223965537
	2017	31.813.498	18.479.528	13.333.970	1,721553602
IGAR	2013	48.442.303.122	13.411.886.964	35.030.416.158	3,611893185
	2014	75.826.220.743	20.927.345.985	54.898.874.758	3,623308029
	2015	63.236.346.206	11.820.161.899	51.416.184.307	5,34987141
	2016	95.774.588.017	26.468.958.222	69.305.629.795	3,618373916
	2017	95.764.791.063	23.388.107.927	72.376.683.136	4,094593345
IMPC	2013	247.652.542.758	61.984.501.284	18.668.041.474	3,995394617
	2014	355.326.184.689	65.527.472.878	289.798.711.811	5,422552848
	2015	147.204.866.336	17.445.790.361	129.759.075.975	8,437844505
	2016	164.796.167.232	38.973.036.457	125.823.130.775	4,228466196
	2017	111.423.979.247	20.120.487.307	91.303.491.940	5,537837009
JPFA	2013	895.947.000	255.310.000	640.637.000	3,509251498
	2014	542.549.000	157.703.000	384.846.000	3,440321364
	2015	697.677.000	173.193.000	524.484.000	4,028321006
	2016	2.766.591.000	594.983.000	2.171.608.000	4,649865626
	2017	1.740.595.000	632.785.000	1.107.810.000	2,750689413

Kode Perusahaan	Tahun	TAX AVOIDANCE			CETR
		Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Setelah Pajak	
KDSI	2013	47.175.692.006	11.172.919.812	36.002.772.194	4,222324406
	2014	57.978.111.301	13.488.971.936	44.489.139.365	4,298186072
	2015	14.890.268.268	3.419.704.975	11.470.563.293	4,354255229
	2016	63.697.916.133	16.570.567.066	47.127.349.067	3,844039608
	2017	93.363.070.902	24.397.862.353	68.965.208.549	3,826690615
SMBR	2013	400.401.904	88.218.068	312.183.836	4,538774347
	2014	394.651.537	66.315.221	328.336.316	5,95114562
	2015	443.414.252	89.234.190	354.180.062	4,969107155
	2016	349.280.550	90.190.025	259.090.525	3,872718186
	2017	208.947.154	62.298.722	146.648.432	3,353955704

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vika Lestari
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 07 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sentana Psr. IX No. 20 Desa Manunggal
Nama Orangtua
a. Ayah : Adi Sumarwan
b. Ibu : Sarbini

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Swasta PAB 4 Helvetia (2003-2009)
2. SMP Negeri 43 Medan (2009-2012)
3. SMA Swasta Dharmawangsa (2012-2015)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2015-2019)

Medan, Oktober 2019

Vika Lestari

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIKA LESTARI
NPM : 1505170141
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari www.idx.co.id.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



VIKA LESTARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 589/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/11/2018

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : vika lestari
NPM : 1505170141
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya perbedaan nilai penjualan antara penjualan laba rugi dan SPT PPH badan dengan penjualan SPT PPN
2. Dalam melakukan pelaporan dan perhitungan selalu mengalami kelebihan bayar setiap bulannya
3. Adanya selisih perhitungan PTKP antara daftar gaji dengan hasil wawancara

Rencana Judul : 1. Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai
3. Analisis penggunaan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21

Objek/Lokasi Penelitian : PT. PLN (Persero) UPT Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Vika Lestari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 589/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa : vika lestari
NPM : 1505170141
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing :
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
Syafrida Hani, SE, MSi (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
29/11/2018 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017) (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 22 Januari 2019

Dosen Pembimbing

(*Syafrida Hani, SE, MSi*)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
10 September 2019 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

V	I	K	A		L	E	S	T	A	R	I								
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	1	9	1										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N		0	7		D	K	T	O	B	E	R				
1	9	9	7																

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L		V	E	T	E	R	A	N		G	G	.	S	E	N	T	A	N
A	P	S	R		I	X		N	O		2	0							

Tempat Penelitian :

B	U	R	S	A		E	F	E	K		I	N	D	O	N	E	S	I	A

Alamat Penelitian :

J	L		I	T		H		J	V	A	N	D	A		B	A	R	U	
N	O		A	S	-	A	G		P	S		M	E	R	A	H			
B	A	R		K	E	C		M	E	D	A	N		K	O	T	A		

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH BE.M.Si)

Wassalam
Pemohon

(VIKA LESTARI)



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3512 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 12 Muharram 1441 H
12 September 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Vika Lestari
NPM : 1505170141
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 452/ TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Vika Lestari**
N P M : **1505170141**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)**

Dosen Pembimbing : **Syafrida Hani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Jumadil Awwal 1440 H
31 Januari 2019 M



Dekan

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : VIKA LESTARI
N.P.M : 1505170141
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
26/18 /12	Perbaiki LBM Fokus Pada Pajak dan CCG Teori yg Menjelaskan about CCG dengan tax Avoidance Siapkan data Pendukung Identifikasi bahan apa Rencana dan Tujuan diPerbaiki.		
24/19 /01	Perbaiki Latar belakang Masalah Perbaiki Definisi Operasional		
28/19 /07	Teknik Penulisan diPerbaiki		
01/19 /02	Perbaiki lagi yang direvisi ACC Proposal		

Dosen Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE., M.Si)

Medan, Januari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Rabu, 06 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : VIKA LESTARI
N . P . M . : 1505170141
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 07 OKTOBER 1997
Alamat Rumah : JL.VETERAN GG.SENTANA NO.20 PSR IX
JudulProposal : PENGARUH GOOG CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFKATUR
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- latar belakang masalah - identifikasi masalah - rumusan masalah - manfaat penelitian
Bab II	- kerangka konsep
Bab III	- metode penelitian - populasi & sampel - teknik analisis data
Lainnya	ditambahkan penulisan paham logis !!
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 06 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3556 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 13 Muharram 1441 H
13 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Vika Lestari
N P M : 1505170141
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00871/BEI.PSR/09-2019
Tanggal : 20 September 2019

Kepada Yth. : H. Januri, SE.,MM.,M.Si.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Jl. Kapten Mucthar Basri No.3
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vika Lestari
NIM : 1505170141
Program Studi : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) *copy* skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



IDX
Indonesia Stock Exchange
M. Pintar Nasution

Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara